

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Abdillah, U. (2002). *Politik Identitas Etnis*. Magelang: Tera.
- Adelina, F. (2019). Bentuk-Bentuk Korupsi Politik. *Jurnal Legislasi Indonesia*, 16(1), 59-75.
- Afdillah, Alif. (2019). Peran Bawaslu dalam Menyelenggarakan Pemilu yang Jujur dan Adil di Kecamatan Gantarang Keke Kabupaten Bantaeng. Makassar: Universitas muhammadiyah Makassar.
- Bari, Abdul. (2017). *Sistem-Sistem Pemilihan Umum*. Semarang: Unisula.
- Haboddin, Muhtar. *Ketika Mahasiswa Bicara Pilkada*. Malang: UB Press.
- Huda, Ni'matul. (2010). *Ilmu Negara*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Ignas Kleden, (2004). *Masyarakat dan Negara: Sebuah Persoalan*. Magelang: Indonesiatera.
- Pahlevi, I. (2015). *Sistem Pemilu di Indonesia: antara Proporsional dan Mayoritarian*. Jakarta: P3DI Setjen DPR Republik Indonesia dan Azza Grafika.
- Puslit IAIN Syarif Hidayatullah. (2000). *Pendidikan Kewarganegaraan Demokrasi, HAM dan Masyarakat Madani*. Jakarta: IAIN Jakarta Press.
- Putri, A. S. (2021). Karakteristik Demokrasi Periode Reformasi (1998-sekarang).
- Rifai, Amzulian. (2003). *Pola Politik Uang dalam Pemilihan Kepala Daerah*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Saleh. (2017). *Hukum Acara Sidang Etik Penyelenggara Pemilu*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Sugiyono. (2018). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif*. Bandung: Afabeta.
- Suryadinata, L. (2010). *Politik Identitas di Indonesia: Masyarakat Majemuk dalam Negara Kesatuan*. LP3ES.

Jurnal

- Enggarani, N.S. (2023). “*The Role of The Election Supervisory Body (BAWASLU) in Preventing The Criminal Act of Election Corruption in Indonesia*”. Dalam Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum de Jure, Vol 4 No. 2.
- Budiono. (2017). “Menggagas Sistem Pemilihan Umum Yang Sesuai Dengan Sistem Demokrasi Indonesia”, dalam Jurnal Ilmiah “Dunia Hukum” Vol.13 No.1.
- Eva, Putu. (2018). INTERPRETASI DEMOKRASI DALAM SISTEM MEKANIS TERBUKA PEMILIHAN UMUM DI INDONESIA. *Jurnal Panorama Hukum*, 3(1).
- Fadhli, Y. Z. (2016). Inkonstitusionalitas Pasal 19 Perma Nomor 2 Tahun 2016 dan Implikasinya terhadap Akses Keadilan Warga Negara. *Jurnal Konstitusi*, 13(4), 700-719.
- Hidayat, A. (2020). Manfaat Pelaksanaan Pemilu Untuk Kesejahteraan Masyarakat. *Politicon: Jurnal Ilmu Politik*, 2(1), 61-74.
- Hutapea, E. K., Santoso, P., Alexandra, H. F. S., Sukendro, A., & Widodo, P. (2023). Tantangan dan Upaya Penanganan Politik Identitas pada Pemilu 2024. *Jurnal Kewarganegaraan*, 7(1), 424-434.
- Irawan. (2015). Studi Tentang Politik Uang (Money Politics) dalam Pemilu Legislatif. *Journal Fisip* Vol. 3
- Jimly A, dkk, Jurnal Konstitusi, Vol. 3 No. 4, 2016, hlm. 17
- Lukmajati, D. (2016). Praktek Politik Uang dalam Pemilu Legislatif 2014 (Studi Kasus di Kabupaten Blora). *Politika: Jurnal Ilmu Politik*, 7(1), 138-159.
- Muhtadi. (2013). Politik Uang dan Dinamika Electoral di Indonesia: Sebuah Kajian Awal Interaksi “Party-ID” dan Patron-Klien. *Journal Fisip* Vol. 10 No. 1.
- Rosyidin dkk. (2018). Pentingnya Pengawasan Partisipatif dalam Mengawal Pemilihan Umum yang Demokratis. *Journal fisip*. Vol. 3
- Sasmito, Bambang. (2019). Penegakan Hukum Terhadap Calon Anggota DPRD Kota Balikpapan yang Melaksanakan Kampanye dengan Menjanjikan Atau Memberikan Uang dan Imbalan Lain Pada Pemilihan Umum Tahun 2019. *Jurnal Lex Suprema*, 1(2).

- Surbakti, A. R., Supriyanto, D., & Santoso, T. (2008). *Perekayasaan Sistem Pemilu Untuk Pembangunan Tata Politik Demokratis*. Jakarta: Kemitraan bagi Pembaruan Tata Pemerintahan di Indonesia.
- Triastuti, E., Prabowo, D. A. I., & Nurul, A. (2017). *Kajian Dampak Penggunaan Media Sosial Bagi Anak dan Remaja*. Jakarta: Pusat Kajian Komunikasi FISIP Universitas Indonesia.
- Wahidin, E. (2020). Menata Penegakan Hukum Pemilu Sebagai Ius Constituendum Menjadi Ius Constitutum Dalam Mewujudkan Pemilihan Umum Yang Berkeadilan. *Jurnal Thengkyang*, 5(1), 57-66.
- Edward, Moch. (2020). Pendidikan Politik dalam Pencegahan Politik Uang Melalui Gerakan Masyarakat Desa. *Jurnal Antikorupsi Integritas*, 6(1), 141-152.
- Nasrudin, J., & Nurdin, A. A. (2019). Politik Identitas dan Representasi Politik (Studi Kasus pada Pilkada DKI Periode 2018-2022). *Hanifiya: Jurnal Studi Agama-Agama*, 1(1).
- Firdaus, M. N., & Andriyani, L. (2021). Politik Atas Identitas Agama, Dan Etnis Di Indonesia. *INDEPENDEN: Jurnal Politik Indonesia dan Global*, 2(2).
- Lestari, Y. S. (2018). Politik Identitas Di Indonesia: Antara Nasionalisme dan Agama. *Journal of Politics and Policy*, 1(1).
- Ahmad, R. (2018). Politik Identitas dalam Pemilihan Umum di Indonesia: Studi Kasus Pemilihan Umum Presiden 2014. *Jurnal Ilmu Politik*, 5(1), 45-60.
- Widodo, Ketua Bawaslu Kabupaten Boyolali, Wawancara Pribadi, pada 24 April 2024, pukul 10.00 WIB.
- Hariyanto, Hariyanto. (2018). Pembangunan Hukum Nasional Berdasarkan Nilai-Nilai Pancasila. *Volksgeist: Jurnal Ilmu Hukum dan Konstitusi*, 1(1). hlm. 56–57.
- Juditha. Christiany. (2019). Buzzer di Media Sosial Pada Pilkada dan Pemilu Indonesia. *Jurnal Prosiding Seminar Nasional Komunikasi dan Informatika*, 3. hlm. 199-212
- Setiawan, Yusuf. (2019). Peran Sosialisasi Bawaslu dalam Meningkatkan Kesadaran Partisipasi Politik Masyarakat. *Jurnal Penelitian Indonesia*.

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Nomor 07 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum

Undang-undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota

Internet

Ajiyanto, Ragil. (2019, 25 Januari). detiknews. Caleg PKS Boyolali Terpidana Politik Uang Masuk Bui Hari Ini. <https://news.detik.com/berita-jawa-tengah/d-4400598/caleg-pks-boyolali-terpidana-politik-uang-masuk-bui-hari-ini>

Bawaslu, go.id Akses Tanggal 13 Maret 2024

Gischa, Serafica. (2020, 6 Februari). “Sejarah Pemilu 1955 di Indonesia Halaman all.” *Kompas.com*.

<https://www.kompas.com/skola/read/2020/02/06/170000669/sejarah-pemilu-1955-di-indonesia>

Humas Bawaslu. (2021, 29 Agustus). Fenomena Politik Uang. <https://jateng.bawaslu.go.id/2021/08/29/fenomena-politik-uang/>.

Indonesia Baik. (2019). Sejarah Pemilu di Indonesia: Tahun 2004. https://indonesiabaik.id/motion_grafis/sejarah-pemilu-di-indonesia-tahun-2004

JawaPos.com. (2017). Aparat Penegak Hukum Ikut Campur dalam Pelanggaran Pemilu. <https://www.jawapos.com/jpg-today/11/12/2017/aparat-penegak-hukum-tempatiposisiataspelanggaran-ham>

Komisi Pemilihan Umum. (n.d). Pemilihan Umum Tahun 1971. <https://www.kpu.go.id/page/read/9/pemilu-1971>.

- _____ (n.d). Pemilihan Umum Tahun 1977-1997.
<https://www.kpu.go.id/page/read/10/pemilu-1977-1997>.
- _____ (n.d). Pemilihan Umum Tahun 2014.
<https://www.kpu.go.id/page/read/1116/pemilu-2014>.
- _____ (n.d). Pemilihan Umum Tahun 2019.
<https://www.kpu.go.id/page/read/1113/pemilu-2019>.
- Kusumaningsih, Asih. (2019, 23 March). “Sejarah Pemilu di Indonesia dari Awal Sampai Sekarang.” *Sejarah Lengkap*.
<https://sejarahlengkap.com/indonesia/sejarah-pemilu-di-indonesia> diakses pada tanggal 29 Mei 2023.
- Saptohutomo, Aryo Putranto. (2022, 19 Mei). “Sejarah Pemilu 1999, Pesta Demokrasi dengan Partai Peserta Terbanyak”.
<https://nasional.kompas.com/read/2022/05/19/15005531/sejarah-pemilu-1999-pesta-demokrasi-dengan-partai-peserta-terbanyak>.
- Supriyanto, Didik. Koordinator Pengawasan Panwas Pemilu. <http://www.Panwaslu>.
- Tjiptabudy, J. (2013). Fungsi dan Peran Panwaslu dalam Sistem Pemilihan Umum di Indonesia Kajian dari Aspek Yuridis.
<http://panwasclawang.wordpress.com/2013/04/03/fungsi-dan-peran-panwasludalam-sistem-pemilihan-umum-di-indonesia-kajian-dari-aspek-yuridis-oleh-j-tjiptabudy/>.
- Wikipedia. Badan Pengawas Pemilu Umum Republik Indonesia.
https://wikipedia.org/wiki/badan_pengawas_pemilu_umum_republik_indonesia , diakses pada 13 Maret 2024